

**Dinamika Politik yang menyebabkan kemunculan Bisnis Militer di Indonesia
antara tahun 1957 dan tahun 1959.**

Haryo Ksatrio Utomo
Dosen Ilmu Politik FISIP UBK
Mahasiswa S3 Ilmu Politik UI

haryo.ksatrio.utomo@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai diskursus bisnis oleh militer yang terjadi di Indonesia selama ini. Artikel ini menelusuri fakta-fakta bahwa kuatnya peran TNI dalam bisnis bermula pada periode tahun 1957 hingga tahun 1959. Masa-masa ketidakstabilan politik ditandai dengan perubahan politik, ancaman disintegrasi, dan lain-lain membuka jalan bagi militer untuk menguasai bisnis terutama perusahaan-perusahaan milik Belanda dan militer dapat mempertahankan hegemoni dalam bisnis hingga sekarang. Artikel ini akan mengulas relasi dinamis antara elit sipil dengan elit militer yang menguasai bisnis di Indonesia pada masa tersebut.

Pendahuluan

Satu tema penting mengenai reformasi militer berkaitan dengan pembatasan ruang gerak terhadap bisnis militer. Pasal 76 UU No 34/2004 tersebut secara jelas disebutkan bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja, proses pembatasan bisnis militer ternyata tidak berjalan secara optimal sebab elit sipil cenderung menggabaikan proses pembatasan bisnis militer tersebut, sehingga reformasi militer tidak semua terjadi dengan sukses. Ketidakmampuan negara untuk membatasi bisnis militer menunjukkan persoalan pembatasan itu bukan hal sederhana, melainkan itu merupakan hal yang kompleks. Kemudian, negara juga terlihat enggan untuk membatasi bisnis militer dan itu tidak terlepas dari kedekatan historis antara elit sipil dengan elit militer.

Makalah ini melihat bahwa proses reformasi bisnis militer tidak berjalan dengan baik sebab itu berkaitan dengan relasi pragmatis antara elit sipil dengan elit militer. Relasi tersebut telah terjadi sejak lama, sehingga itu juga menyebabkan

ketiadaan batasan yang jelas antara sipil dan militer. Ketiadaan batasan yang jelas menyebabkan tidak ada batasan yang tegas mengenai relasi bisnis antara militer dan sipil. Pembahasan mengenai bisnis militer memang tidak terlepas dari relasi pragmatis antara elit sipil dengan elit militer. Relasi yang dekat dari kedua aktor politik tidak terlepas dari masa pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan gabungan dari para milisi pejuang kemerdekaan dan para laskar Islam dengan pasukan militer nasional yang secara khusus sebagian pernah bergabung dengan PETA dan pasukan Belanda.

Percampuran antarelelemen tersebut memang menyebabkan ketiadaan batas yang jelas antara elit sipil dengan elit militer sebab kedua elit menyadari bahwa kombinasi semua elemen menjadi penting untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terutama pada masa perang mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda yang ingin memasuki Indonesia. Militer pun secara perlahan mulai terlibat dalam birokrasi yang kemudian membuka akses kepada sumber bisnis. Militer mampu menguasai bisnis secara masif saat masa akhir Demokrasi Parlementer antara tahun 1957 hingga tahun 1959.

Perumusan Masalah

Masa akhir Demokrasi Parlementer merupakan saat pemerintahan demokratis mulai berakhir dan menuju pemerintahan otoritarian. Fase terakhir ini ditandai dengan pandangan kritis dari Soekarno dan militer terhadap situasi politik yang terjadi di Indonesia. Situasi tersebut berkaitan dengan kegagalan pemerintahan pusat untuk membentuk satu sistem birokrasi yang solid. Kondisi demikian tidak dilepaskan dari kenyataan bahwa pemerintahan pusat sangat tidak stabil disebabkan kabinet parlementer sering mengalami pergantian kabinet. Birokrasi pusat yang lemah menyebabkan negara memiliki kontrol lemah dan daerah juga sering melakukan pemberontakan. Terakhir, situasi politik pasca Pemilu tahun 1955 juga gagal menghasilkan pergantian konstitusi (Fakih, 2013, 100). Militer dan Soekarno menunjukkan ketidakpuasan terhadap kemampuan sipil untuk menangani krisis politik. Hal itu kemudian berujung dengan Dekrit Presiden tahun 1959.

Masa akhir periode Demokrasi Parlementer juga menandai era kebangkitan militer sebagai kekuatan politik nasional. Militer sebagai aktor politik mulai berperan secara signifikan menjelang masa akhir Demokrasi Terpimpin sebab militer merupakan organisasi yang termasuk solid saat terjadi berbagai krisis politik dan krisis keamanan, sehingga militer secara masif membentuk birokrasi militer yang kuat. Kemudian, negara melalui Soekarno juga membuka jalan kepada militer untuk hadir sebagai penyeimbang terhadap kekuatan sipil yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat. Kemudian, Soekarno juga mulai menerapkan doktrin korporatisme dengan menyatukan semua elemen negara untuk bekerja sama secara harmonis, dengan militer sebagai pendukung utama Soekarno. Situasi tersebut menyebabkan militer mampu menguasai birokrasi sipil, dan itu membuka jalan bagi militer untuk menguasai bisnis.

Penguasaan bisnis oleh militer juga menjadi semakin menarik saat militer, elit bisnis lokal dan nasional, dan elit sipil juga bersikap pragmatis. Sikap pragmatis tersebut menyebabkan pintu penguasaan bisnis oleh militer juga semakin terbuka. Militer mampu menguasai bisnis sebab ketiadaan konsensus elit sipil yang bersedia untuk bersatu, sehingga elit sipil cenderung terfokus kepada persaingan elit. Elit bisnis pun memilih untuk bermitra dengan militer. Sikap pragmatis elit bisnis untuk berelasi dengan militer menyebabkan militer menjadi patron utama bagi kelompok bisnis. Kemudian, negara juga cenderung untuk memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam pengembangan bisnis dan nasionalisasi aset asing pada masa akhir Demokrasi Parlementer.

Pertanyaan Penelitian

Kondisi demikian menyebabkan makalah ini mengajukan satu pertanyaan penelitian. Mengapa Militer bisa memasuki Bisnis saat masa akhir Demokrasi Parlementer?. Kemudian, mengapa elit sipil membiarkan militer berbisnis pada masa akhir Demokrasi Parlementer?.

Metode Penelitian

Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2014) dan Neumann (2014) berpendapat penelitian kualitatif merupakan penelitian

dengan paradigma berpikir yang menempatkan proses penelitian tidak perlu menjaga jarak dari obyek penelitian sebab prosedur penelitian harus mampu mendekati obyek riset untuk bisa menginterpretasikan simbol dan makna dari interaksi sosial atau untuk mengkritisi dan mengubah kondisi sosial dan politik dalam masyarakat. Makalah ini juga menganalisa sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan pembahasan mengenai dinamika politik berkaitan dengan perkembangan bisnis militer selama masa akhir Demokrasi Parlementer.

Kerangka Teori

Makalah ini menggunakan tiga teori terkait dengan mengenai dinamika politik berkaitan dengan bisnis militer. Pertama, makalah menggunakan teori negara korporatisme. Negara korporatif menurut Cardoso et al (2012), Kaspersen et al (2006), dan Baccaro (2002) merupakan tipologi negara yang menyinergikan dan memonopolisasikan unit-unit berbeda dari negara menjadi satu bagian unit yang mampu menjadi alat negara untuk mengembangkan tujuan-tujuan politik tersebut. Fenomena pelibatan militer dalam struktur politik nasional menunjukkan wujud dari negara korporatisme sebab elit sipil dengan sengaja memasukkan militer untuk terlibat dalam semua urusan sipil dan itu termasuk dengan bisnis.

Fenomena korporatisme juga bisa terjadi pada saat sipil mengalami pelemahan atau kegagalan, sehingga militer mampu mendominasi sistem yang ada dan menempatkan sipil dalam satu bagian pemerintahan yang ada. Korporatisme memungkinkan militer untuk memasuki bisnis sebab negara membutuhkan kestabilan politik demi pembangunan negara. Negara dalam konteks makalah memasukkan militer dalam politik sebab pemerintahan Soekarno membutuhkan kestabilan politik pasca kemunculan gangguan keamanan dan gangguan kedaulatan Indonesia. Soekarno juga berupaya memasukkan semua elemen dalam negara untuk mengakhiri ketidakharmonisan para elit politik selama masa Demokrasi Parlementer.

Kedua, makalah juga menggunakan teori *Need Based and Transactional Fusion*. *Need Based* menurut Sebastian et Al (2018, pp. 73) bermakna bahwa militer akan terlibat dalam urusan sipil jika, dan hanya jika, otoritas sipil melihat bahwa perlu ada pelibatan militer dalam politik dengan lingkup dan tingkat keterlibatan

yang ditentukan oleh otoritas sipil. Meskipun masalah pengawasan dan pengabaian adalah konsekuensi yang jelas, otoritas sipil di Indonesia sering melihat manfaat bagi militer yang mengawasi pelaksanaan kebijakan nasional. Kemudian, konsep "Transaksional" mengacu pada kemauan militer untuk terlibat dalam kebijakan sebab itu termotivasi oleh kepentingan pribadi atau kelembagaan. Hal itu menyebabkan relasi antara sipil tidak terjadi dalam wujud subordinasi atau hubungan pelindung-klien, namun militer justru dianggap sebagai lebih dari mitra yang sama dengan otoritas sipil.

Poin penting dari teori di atas berkaitan dengan pelibatan militer dalam politik sipil termasuk dalam pengelolaan bisnis oleh militer. Teori di atas menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam perpolitikan sering juga disebabkan oleh permintaan elit sipil itu sendiri. Kebutuhan atas kestabilan politik menyebabkan sipil kemudian memasukkan militer dalam perpolitikan nasional. Hanya saja, militer bisa saja memiliki pandangan politik sendiri sehingga militer pun bersedia memasuki sistem politik nasional. Kemudian, militer dan sipil juga melakukan hubungan transaksional yang saling menguntungkan satu sama lain. Transaksi yang terjadi bisa terjadi dalam wujud militer boleh mengontrol pemerintahan setara dengan sipil atau militer tetap dalam relasi profesional dengan sipil, namun itu membutuhkan imbalan tersendiri, misalnya militer boleh mempertahankan aset bisnis strategis milik militer. Penguasaan aset menjadi penting untuk menyiasati keterbatasan anggaran militer dari negara.

Teori di atas juga bisa menjelaskan penyebab militer bisa menguasai bisnis lokal dan nasional. Teori tersebut menunjukkan penguasaan aset bisnis nasional dan lokal merupakan dampak dari kebijakan Soekarno untuk melibatkan militer dalam politik nasional. Soekarno menghendaki dua hal pada masa akhir Demokrasi Parlementer. Pertama, Soekarno menginginkan ada keharmonisan politik bagi semua organ kekuasaan. Kalangan militer juga memiliki pandangan yang sama. Kedua, Soekarno menginginkan kestabilan politik dan militer merupakan kekuatan politik di luar sipil yang mampu menjadi pendukung utama Soekarno. Kondisi demikian menyebabkan pengaruh militer menjadi semakin kuat, dan Soekarno cenderung membiarkan militer untuk turut serta dalam kegiatan bisnis nasional.

Ketiga, teori *developmentalism class coalition* dari Bresser-Pereira (2017) menempatkan koalisi antara elit pebisnis dengan elit penguasa atas dasar keinginan untuk mempertahankan bisnis saat terjadi ancaman ideologis atau ancaman yang bersifat pragmatis. Koalisi tersebut muncul pada saat kalangan bisnis menemukan situasi politik yang mampu mengancam ketidakstabilan politik yang kemudian bisa berdampak buruk bagi kegiatan bisnis yang ada. Bresser-Pereira menjelaskan satu contoh kasus pembentukan koalisi tersebut pada saat ancaman kekuatan komunis terhadap kekuatan politik negara, maka koalisi tersebut menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mengatasi ancaman tersebut. Fenomena yang berbeda bisa saja terbentuk koalisi yang kuat pada saat negara mengalami potensi ancaman keamanan dari gerakan-gerakan pemberontakan politik dalam berbagai wilayah.

Pembahasan

Penguatan peran militer dalam bisnis berakar dari pembentukan jaringan birokrasi militer yang justru terjadi sejak masa pemerintahan Soekarno. Birokrasi militer pada masa Soekarno menjadi dominan dalam struktur pemerintahan nasional karena delapan faktor utama. Semua faktor tersebut memperkuat dominasi militer dalam politik dan bisnis.

Pertama, militer menurut Mietzner (2008) telah mengembangkan birokrasi informal melalui kekuatan jaringan para militer atau laskar pada masa perang kemerdekaan. Birokrasi informal dalam konteks makalah terbentuk pada saat militer dan milisi menguasai struktur perusahaan atau kantor-kantor pemerintahan milik Belanda dan Jepang. Milisi yang menguasai birokrasi dan perusahaan tidak semua memiliki kapasitas yang sama untuk mengelola birokrasi dan perusahaan. Militer secara perlahan mengembangkan kapasitas sehingga birokrasi militer menjadi semakin kuat sebab militer harus mampu memenuhi kebutuhan sendiri karena keterbatasan anggaran negara membiayai militer.

Kedua, negara menyatakan keadaan darurat pada tahun 1957 pasca terjadi rangkaian pemberontakan daerah. Negara memperkuat peran militer untuk mengatasi krisis keamanan dan pertahanan nasional di berbagai daerah. Militer sebagai organ birokrasi yang memiliki kekuatan senjata dan kesolidan manajerial secara perlahan mampu menggantikan peran birokrat sipil yang cenderung berpihak

kepada partai politik atau kelompok kepentingan elit daerah. Militer pada saat krisis secara strategis mengontrol simpul-simpul bisnis lokal yang berada dalam daerah konflik politik. Elit sipil yang tersisa dalam daerah konflik cenderung membiarkan militer memasuki semua lini pemerintahan demi alasan kestabilan politik pasca krisis keamanan daerah. Elit nasional juga membiarkan hal itu dengan tujuan TNI bisa mengurangi ketergantungan anggaran kepada negara.

Ketiga, militer melakukan kudeta gagal pada tahun 1952. Kudeta gagal bermula pada saat militer mengalami perpecahan antara faksi Nasution dengan faksi Bambang Supeno berkaitan dengan rasionalisasi militer. Kubu Nasution menghendaki militer harus didominasi oleh hasil tentara yang tidak berhubungan dengan kekuatan lama era kolonial, dan itu berada dalam kubu Supeno. Supeno kemudian membawa konflik ini hingga ke level parlemen yaitu DPRS. Militer faksi Nasution melihat tindakan Supeno sebagai tindakan indisipliner yang melanggar kode etik militer. Kondisi semakin rumit saat DPRS akan membentuk komisi negara untuk mengevaluasi militer, mulai dari organisasi, birokrasi, hingga bisnis militer. Militer melihat DPRS tidak berwenang melakukan hal itu sebab parlemen memuat tokoh-tokoh yang pernah memberontak pada masa lalu (Fadillah, 2014).

Militer kemudian melakukan perlawanan terhadap tindakan parlemen. Militer menahan enam anggota parlemen dan Manai Sophiaan termasuk politisi yang menjadi sasaran, namun ia berhasil selamat. Kemudian, para panglima berkumpul di Staf Umum Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952. Hasil konsolidasi tersebut menyepakati untuk menekan negara. Militer kemudian mengerahkan pasukan Tank dengan arah meriam mengarah kepada istana. Sukarno dan para panglima yang dipimpin Nasution berunding. Nasution menuntut parlemen dibubarkan. Sukarno menolak permintaan tersebut dan dia juga kemudian memutuskan untuk memberhentikan Nasution sebagai KSAD untuk pemulihan situasi politik (Rundjan, 2014), namun itu hanya sementara sebab Nasution kembali menjadi pemimpin AD tahun 1955. Soekarno juga memberikan peran birokrasi lebih besar kepada militer sebagai kompensasi pemberhentian Nasution.

Keempat, militer pada tahun 1958 mengajukan konsep jalan tengah dengan asas kekeluargaan. Doktrin ini juga dikenal sebagai Dwi Fungsi Militer. Doktrin

dari Nasution menegaskan bahwa militer memiliki peran yang setara dengan birokrasi sipil, sehingga militer juga harus terlibat aktif dalam pembenahan struktur kekuasaan negara. Militer yang memiliki posisi setara dengan sipil bermakna bahwa militer tidak berada dalam aturan sipil dan militer tidak boleh terjebak dalam konflik elit sipil, serta militer harus berada dalam posisi netral sebagai pengawal kedaulatan Indonesia (Bakti et al, 2009). Birokrasi militer semakin kuat terutama sejak militer menguasai perusahaan strategis hasil nasionalisasi terhadap aset Belanda (Vatikiotis 2004) dan juga mengambil alih jaringan bisnis lokal di berbagai wilayah yang menjadi milik dari Partai Nasional Indonesia.

Kelima, negara membentuk Dewan Perencanaan Nasional sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang berperan untuk mendesain strategi pembangunan nasional (Fakih, 2013, 102-103). Pembentukan lembaga Depernas berdasarkan UU 80/1958, DEWAN PERANCANG NASIONAL tanggal 23 Oktober 1958. UU menegaskan setiap kementerian perlu berkoordinasi dengan Depernas dengan tujuan harmonisasi kebijakan pembangunan. Kemudian, Depernas juga mencerminkan paradigma korporatisme dan itu terlihat dalam penegasan bahwa lembaga ini akan menyatukan semua elemen rakyat Indonesia. Elemen tersebut terdiri dari kalangan cendekiawan atau kalangan sarjana yang memahami pembangunan, elit birokrat sipil yang berada dalam pemerintahan pusat dan daerah, dan elit militer yang menguasai masalah pembangunan nasional. Depernas menempatkan militer sebagai aktor ekonomi tidak hanya di tingkat nasional namun itu juga menguasai bisnis lokal terutama di wilayah konflik.

Penguasaan jaringan bisnis lokal melalui birokrasi militer di daerah konflik politik dengan pemerintah perlu dianalisa dengan dua perspektif. Pertama, pelibatan militer dalam birokrasi lokal pasca konflik politik menunjukkan keberadaan paradigma fusi transaksional. Fusi transaksional terjadi pada saat sebagian elit sipil memilih untuk bekerja sama dengan kalangan elit militer sebab itu untuk memperoleh kestabilan politik. Fusi transaksional juga terjadi antara elit militer dengan para elit pengusaha yang membutuhkan perlindungan militer. Kedua, kondisi konflik politik menyebabkan terbentuk relasi koalisi kelas developmentalisme. Koalisi tersebut merupakan hasil pada saat kalangan pebisnis merasakan ada ancaman dari kelompok-kelompok pemberontak dari setiap daerah.

Para pengusaha membutuhkan perlindungan militer dan militer pun memperoleh imbalan dalam wujud akses kepada jaringan bisnis lokal.

Keenam, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional merupakan lembaga korporatisme dengan Presiden Soekarno dan Wakil Ketua Ruslan Abdulgani. Soekarno menghendaki elit partai politik untuk berkonflik. Soekarno dan angkatan darat menyakini bahwa partai-partai politik itu merupakan penyebab perpecahan nasional sebab konflik elit juga telah memecah belah masyarakat menurut garis-garis ideologis. Masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik mengalami perasaan frustrasi. Dewan Nasional, "politbiro" Presiden Soekarno, telah menjadi lembaga pembuat kebijakan eksekutif yang pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh Parlemen (Bathoro, 2018). Dewan Nasional memperkuat peran militer dalam birokrasi, sehingga militer juga menguasai akses bisnis.

Ketujuh, peran Partai Nasional Indonesia mulai melemah pada masa akhir Demokrasi Parlementer. Pelemahan itu juga tidak terlepas dari perubahan ideologis partai. PNI untuk memenangkan pemilu secara sadar memilih untuk menyasar kalangan priyayi yang juga termasuk kelas borjuasi lokal yang menguasai birokrasi pada tahun 1955 hingga tahun 1957. Kelas priyayi tersebut kemudian mendominasi PNI dan menyisihkan kelas pembela Marhaen. Hal itu menyebabkan terjadi ironi politik saat PNI berhasil memasukkan agenda reformasi agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 justru menjadi partai yang tidak konsisten mendukung UU tersebut terutama saat kader-kader PNI dalam birokrasi daerah memberikan dukungan atau asistensi kepada kepala daerah, kelompok bisnis lokal, dan tuan tanah untuk melanggar ketentuan agraria nasional. Hal ini tidak terlepas dari sikap PNI yang selama masa demokrasi liberal justru menjalin interaksi kuat dengan para pedagang besar di daerah dan menikmati peran sebagai broker dagang untuk menjembatani antara negara dan pebisnis (Kaligis, 2014).

Pelemahan peran PNI juga disebabkan oleh tindakan Soekarno untuk mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 tahun 1959 yang membatalkan UU Otonomi Daerah tahun 1957. Pembatalan tersebut menyebabkan pemerintah pusat kembali memperkuat kontrol terhadap birokrasi daerah melalui jaringan pamong

praja. Kebijakan tersebut secara sistematis memperlemah kekuatan partai di daerah untuk menguasai daerah, dan itu sekaligus mengurangi relasi partai dengan jaringan pengusaha lokal, dan itu jelas menjadi kerugian besar bagi PNI. UU otonomi daerah memang tidak terlalu berpengaruh sebab sebagian birokrasi daerah yang mengalami krisis pemberontakan politik sudah beralih ke militer, namun birokrasi yang merupakan basis PNI kuat di Jawa Tengah dan Bali. Pelemahan tersebut menyebabkan terjadi pengalihan aset bisnis strategis dari PNI kepada militer.

Kalangan pebisnis lokal cenderung untuk mendukung kebijakan pengalihan aset bisnis dari elit lokal kepada militer. Dukungan tersebut dalam konteks teori transaksional dan koalisi kelas *developmentalisme*. Kalangan pebisnis lokal menyadari hanya militer yang mampu menangani krisis keamanan dalam daerah-daerah yang mengalami pemberontakan. Kalangan pebisnis juga melihat bahwa elit sipil daerah tidak mampu mengatasi krisis, dan tindakan elit yang lebih mengutamakan kepentingan elit juga menjadi penyebab krisis politik yang berujung kepada pemberontakan daerah. Kemudian, kalangan pebisnis lokal memang sebenarnya juga telah menjalin hubungan erat sejak masa Revolusi Kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949.

Kedelapan, negara mengeluarkan kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset strategis milik Belanda. Kebijakan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958. Undang-undang tersebut memberikan hak bagi pemerintah untuk menguasai aset-aset strategis Indonesia yang merupakan bekas Belanda dengan Mayor Jendral AH Nasution sebagai Penguasa Perang Pusat sebagai pemegang mandat nasionalisasi tersebut (Detik.com, 2009). Penunjukkan militer dalam hal Angkatan Darat juga menjadi jalan bagi negara untuk mengakhiri ketidakstabilan politik berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda yang memunculkan krisis politik.

Krisis politik berkaitan dengan nasionalisasi tersebut berawal dari respon negara terhadap isu Irian Barat. Isu Irian Barat menjadi hal penting bagi RI sebab itu berkaitan dengan kedaulatan RI. Penguasaan RI terhadap Irian Barat memiliki manfaat untuk mengakhiri kekuatan Belanda di Indonesia. RI pun menempuh jalur diplomasi. Hanya saja, poses perundingan RI dengan Belanda di Sidang PBB pada

tahun 1957 untuk membahas pengembalian Irian Barat ke Indonesia tidak berhasil. Pemerintah Indonesia kemudian memerintahkan aksi mogok massal di semua perusahaan Belanda. Kemudian, kalangan buruh merespon pemogokan tersebut yang kemudian berlanjut dengan pengambilalihan paksa (Subangun, 2017).

Penguasaan aset Belanda oleh buruh memunculkan potensi ancaman geopolitik saat Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan aksi strategis ke Indonesia, sehingga negara harus bertindak taktis. AS menilai situasi politik Indonesia tidak baik sebab kekuatan buruh yang berafiliasi dengan kelompok komunis yang mendominasi proses penguasaan aset Belanda. Negara pun berupaya untuk mengambil alih aset tersebut dari kalangan buruh. Negara mengeluarkan UU Keadaan Darurat pada tanggal 15 Desember 1957. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memulihkan keamanan politik dan mengakhiri penguasaan aset strategis oleh buruh. Militer menjadi kekuatan utama untuk mengimbangi buruh yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia pada tanggal 3 Desember 1958 juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23/1958 yang menyatakan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI (Ibid).

Kekuatan birokrasi militer menjadi fondasi militer untuk mengelola berbagai aset strategis, dan itu termasuk penguasaan bisnis minyak nasional. Penguasaan bisnis minyak dimulai sejak tahun 1957 ketika Nasution menyuruh Deputi II, Kolonel Ibnu Sutowo untuk mengambil alih ladang minyak di Sumatera. Pada masa Demokrasi Terpimpin, tiga perusahaan minyak Caltex, Stanvac, dan Shell dengan berat hati menyerahkan konsesi-konsesi yang mereka peroleh sejak jaman kolonial Belanda dengan sistem bagi hasil dengan perusahaan pemerintah, yaitu Permina. Permina ini kemudian berubah menjadi Pertamina pada tahun 1968 sebagai dampak dominasi militer Angkatan Darat terhadap birokrasi sipil sejak tahun 1966. Kegiatan Permina dengan cepat berkembang ke bidang lain dari produksi minyak. Pertamina ikut serta dalam Far East Oil Trading Company yang didirikan di Jepang 1965 dan Tugu Insurance di Hongkong. Penanaman modal juga dilakukan di beberapa proyek besar di bidang petrokimia (Widoyoko et al, 27).

Kesimpulan

Makalah ini melihat bahwa pembahasan mengenai penyebab militer memasuki bisnis berkaitan dengan keterbatasan anggaran negara untuk membiayai operasional dan kesejahteraan militer. Alasan tersebut menyebabkan negara cenderung membiarkan militer memasuki birokrasi dan bisnis. Internalisasi militer dalam bisnis dan militer harus memperhatikan kondisi politik yang mendasari masuknya militer dalam bisnis di Indonesia. Kondisi politik yang beragam menyebabkan internalisasi militer dalam bisnis menjadi dominan. Internalisasi militer bermula dengan pelibatan militer dalam birokrasi sipil dan militer kemudian secara perlahan membentuk birokrasi yang bebas dari pengaruh sipil. Elit sipil sejak masa kemerdekaan hingga masa sekarang cenderung menerapkan prinsip fusi transaksional dengan militer dengan tujuan memperoleh konsolidasi politik dengan kadar yang berbeda-beda.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa Soekarno merupakan elit politik pertama yang melibatkan militer secara penuh untuk memperoleh dukungan kuat selama Masa Orde lama. Masa orde lama merupakan fase saat Soekarno memasukkan militer dalam strategi korporatisme yang bertujuan untuk menciptakan keserasian politik melalui demokrasi terpimpin. Penyatuan militer dalam struktur politik nasional memberikan peluang bagi militer untuk memperkuat pengaruh dalam birokrasi lokal dan nasional, sehingga itu mampu mengoptasi jaringan bisnis lokal dan nasional secara bersamaan. Proses tersebut bisa berhasil sebab jaringan pebisnis lokal di beberapa wilayah membutuhkan dukungan dari militer pada saat terjadi kondisi darurat nasional yang bermula dari rangkaian gangguan keamanan dan pemberontakan. Kalangan pebisnis lokal dan nasional kemudian menjadi bagian dari struktur koalisi kelas developmentalis.

Relasi kelas developmentalisme tersebut terus berlanjut hingga masa Soeharto. Pemerintahan Soeharto menempatkan para perwira militer aktif sebagai pendukung utama pemerintahan. Soeharto menerapkan strategi korporatisme dengan militer sebagai pengontrol birokrasi. Militer tetap mempertahankan jaringan informal dan formal dengan kalangan pengusaha yang ada. Kemudian, militer secara masif turut mengembangkan berbagai perusahaan yang ada dengan

memperkuat relasi fusi transaksional dengan para pengusaha tersebut, sehingga militer mampu memperoleh pemasukan yang besar dari setiap perusahaan milik militer. Kemudian, militer dengan sengaja tetap mempertahankan koalisi kelas developmentalis untuk menunjang bisnis militer sebab negara memang memiliki anggaran terbatas terutama pasca perjanjian Konferensi Meja Bundar yang mengharuskan RI membayar utang kepada Belanda.

Referensi:

Basuki, Ahmad Yani. (2014). Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, 19: 2, 135-166.

Baccaro, L. (2002). The Construction of “Democratic” Corporatism in Italy. *POLITICS & SOCIETY*, 30: 2, 327-357.

Bakti, Ikrar N., Sri Yanuarti and Mochamad Nurhasim Fakhri. (2009). *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*. CRISE WORKING PAPER No. 62, Januari 2009.

Bathoro, A. (2018). REDUPNYA PERAN POLITIK ISLAM DI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (STUDI KASUS PEMBUBARAN MASYUMI OLEH PRESIDEN SOEKARNO). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2:02.

Bresser-Pereira, L.C. (2017). The two forms of capitalism: developmentalism and economic liberalism. *Brazilian Journal of Political Economy*, 37: 4 (149), pp. 680-703.

Cardoso, José L., and Pedro Mendonça. (2012). CORPORATISM AND BEYOND: AN ASSESSMENT OF RECENT LITERATURE. ICS Working Paper. http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/6770/1/ICS_JLCardoso_Corporatism_WORRN.pdf.

Creswell, John W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.

Detik.com. (2009). *Pengalihan Aktivitas Bisnis Militer di Indonesia*, 5 Oktober, <https://m.detik.com/news/opini/d-1215116/pengalihan-aktivitas-bisnis-militer-di-indonesia->.

Fadillah, R. (2014). *17 Oktober, saat TNI kerahkan meriam & tank minta DPR dibubarkan*, 17 Oktober, <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/17-oktober-saat-tni-kerahkan-meriam-tank-minta-dpr-dibubarkan-17-oktober-1952-4.html>.

Fukuoka, Yuki. (2012). Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 34:1, pp. 80-100, Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/41446245>.

Kaspersen, L.B., and Ulrich Schmidt-Hansen. (2006). THE STATE AND CORPORATISM The role of the state in the development and reproduction of “the Danish model.” *Working paper no 32, 2006*, <https://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7362/working%20paper%20-%20the%20state%20and%20corporatism.pdf?sequence=1>.

MacIntyre, A. (1994). Organising Interests: Corporatism in Indonesian Politics. *Working Paper No.43*, https://www.murdoch.edu.au/Research-capabilities/Asia-Research-Centre/_document/working-papers/WP43.pdf.

Mietzner, M. (2008). Soldiers, parties and bureaucrats: illicit fund-raising in contemporary Indonesia. *South East Asia Research, Vol. 16, No. 2, SPECIAL ISSUE: THE STATE AND ILLEGALITY IN INDONESIA*, pp. 225-254.

Mietzner M., Misol L. (2013) Military Businesses in Post-Suharto Indonesia: Decline, Reform and Persistence. In: Rüländ J., Manea MG., Born H. (eds) *The Politics of Military Reform. Global Power Shift (Comparative Analysis and Perspectives)*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://remote-lib.ui.ac.id:2067/10.1007/978-3-642-29624-6_5.

Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches W. Lawrence Neuman Seventh Edition*. Harlow: Pearson Education Limited.,

Purwanto, Bambang. (2009). Decolonisation and the Origin of Military Business in Indonesia. In: Hägerdal, Hans (Eds) *Responding to the West : Essays on Colonial Domination and Asian Agency*. Amsterdam University Press. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail.action?docID=474293>. Created from indonesiau-ebooks on 2019-04-20 06:35:00.

Rabasa, A., and John Haseman. (2002). *The Military and Democracy in Indonesia*. RAND Corporation.

Rundjan, R. (2014). Moncong Meriam Menodong Istana, 17 Oktober, <https://historia.id/politik/articles/moncong-meriam-menodong-istana-vxY4P>.

Sebastian, L. C., Emirza Adi Syailendra, and Keoni Indrabayu Marzuki. (2018). Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period. *Asia Policy*, 13:3, 49–78.

Subangun, T. (2017). Kronik Nasionalisasi Perusahaan Asing Tahun 1957, 22 Februari, <http://www.berdikarionline.com/kronik-nasionalisasi-perusahaan-asing-tahun-1957/>.

Widoyoko, D., Irfan Muktiono(alm), Adnan Topan Husodo, Barly Harliem Noe, Agung Wijaya. *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*. Indonesia Corruption Watch.